

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
TAHUN 2016**



S A K I P

**PASURUAN
2017**

BAB I

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Diskominfo dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

LKIP Diskominfo Kab. Pasuruan Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan disebutkan “Mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang Informatif berbasis Teknologi Informasi”. Sedangkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan bidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat serta promosi potensi daerah guna mendukung dinamika ekonomi;
2. Pemberdayaan teknologi informatika dengan bijak dan dinamis dalam menunjang pembangunan;
3. Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dalam upaya mendukung pengembangan potensi lokal.

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi informasi dan media massa antara lain untuk meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan peran pers yang bebas, membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi, informasi dan media massa antara lain adalah untuk mendorong pemberdayaan potensi masyarakat. Pemerintah punya tanggung jawab yang besar dalam menciptakan keterbukaan informasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers yang kondusif bagi pengembangan peran serta masyarakat dalam era globalisasi informasi. Oleh karena itu secara konsisten, segenap komponen bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan perlu turut serta mendapatkan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian kebebasan dibidang informasi, komunikasi dan media massa diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan terkait dengan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu “Terwujudnya sistem informasi yang mampu mendorong produktifitas”, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah ;
- b. Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk pemeratakan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh

informasi, dan menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek ;

- c. Meningkatkan peran media massa dan *cyber-media* yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat, edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif ;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan media telekomunikasi dan informasi sehingga dalam aspek pelayanan publik sudah tidak perlu lagi temu muka antara pelayan dan yang terlayani .
- e. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi .

GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI DINAS KOMINFO KAB. PASURUAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan secara kelembagaan telah dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Pasuruan No. 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati No. 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi. Penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam Bidang Komunikasi dan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika ;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dibidang Hubungan Masyarakat, Pemberdayaan Informasi dan Ketelematikaan ;
- c. Pelaksanaan Pemberdayaan TIK, Monitoring Pos dan Telekomunikasi serta Pengembangan TIK ;
- d. Pelaksanaan Pemberdayaan Informasi melalui pemberdayaan potensi informasi kelompok informasi masyarakat, pengumpulan data informasi dan penyebaran informasi ;

- e. Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pameran dan potensi daerah;
- g. Pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian informasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan informasi melalui media;
- i. Pengolahan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a. Sekretaris, membawahi :

- Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub.Bagian Keuangan
- Sub. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

b. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi :

- Seksi Pameran dan Promosi Daerah
- Seksi Media Massa dan Penerbitan
- Seksi Liputan dan Dokumentasi

c. Bidang Pemberdayaan Informasi, membawahi :

- Seksi Kelompok Informasi Masyarakat
- Seksi Penyebaran Informasi
- Seksi Data Informasi

d. Bidang Telematika, membawahi :

- Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Seksi Pengembangan Teknologi dan Informasi
- Seksi Pos dan Telekomunikasi

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

KEPEGAWAIAN DINAS KOMINFO KAB. PASURUAN

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan memiliki pegawai sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 37 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eseleon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV a) sebanyak 12 orang, staf pelaksana sebanyak 14 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Diskominfo Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

TABEL 1. KOMPOSISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			3			3
4	Kepala Seksi				12		12
5	Staf PNS					20	20
	JUMLAH		1	4	12	20	37

Selain pegawai berstatus PNS dan Pegawai PTT, Diskominfo Kabupaten Pasuruan juga dibantu oleh 38 (Tiga Puluh Delapan) orang tenaga sukarelawan/ honorer (sukwan). golongan III menempati jumlah terbanyak di Diskominfo Kabupaten Pasuruan sebanyak 20 orang, diikuti golongan II sebanyak 6 orang, golongan IV sebanyak 5 orang dan sukwan sebanyak 43 orang.

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Diskominfo Kabupaten Pasuruan dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Diskominfo dapat dilihat di tabel 2. Sebagai ilustrasi komposisi pendidikan pegawai di lingkungan Diskominfo Kabuapten Pasuruan, ditunjukkan oleh gambar 3.

TABEL 2. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris			1					1
3	Kepala Bidang		2			1			3
4	Kepala Seksi		1	8	2	1			12
5	Staf		1	5	4	9	1		20
	JUMLAH	0	5	14	6	11	1	0	37

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, sebanyak 5 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan 1 orang staf. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 14 orang, D3 sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 11 orang, dan pegawai dengan pendidikan SLTP sebanyak 1 orang.

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Diskominfo Kabupaten Pasurua, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kabupaten Pasuruan.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Perencanaan kerja di implemtasikan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan atau dengan format RKT yang berdasarkan Renstra dan RPJMD. Dari Renja disusunlah RKA setelah itu DPA bersama dengan itu ditetapkan Perjanjian Kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja pada tahun 2016 selain Perjanjian Kinerja SKPD yaitu Perjanjian Kinerja antara Bupati Pasuruan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan juga terdapat Perjanjian Kinerja Eselon, yaitu antara Kepala Dinas Dengan Pejabat dibawahnya yaitu Sekretaris dan Kepala Bidang-Kepala Bidang Eselon III. Serta Perjanjian Kinerja Eselon antara Sekretaris dan Kepala Bidang dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV. (Perjanjian Kinerja SKPD dan Perjanjian Kinerja Eselon Terlampir)

Perjanjian Kinerja dapat diuraikan secara ringkas adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis terdapat 4 (empat) sasaran, yaitu pertama Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat. Kedua Terwujudnya Penyebarluasan Informasi berbagai Media, dan ketiga Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat dan keempat Tersedianya Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika yang Berbasis IT.

Dari ke empat sasaran strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi Masyarakat	1. Pelayanan Informasi / Pengaduan Masyarakat	1. 72 Pengaduan
2	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi berbagai media	1. Pembentukan KIM 2. Pemberdayaan KIM 3. Leaflet 4. Baliho	1. 3 kelompok 2. 70 kelompok 3. 5 tema 4. 48 tema

3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika yang berbasis TI	5. Spanduk 6. Majalah/Tabloid 7. Radio 1. Telecenter /Pusat layanan internet masyarakat 2. Web Site milik Pemda 3. Peningkatan system komunikasi antar SKPD	5. 48 tema 6. 24000 eksemplar 7. 54 kali 1 buah Ada 65 SKPD
4	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah kepada Masyarakat	1. Penyelenggaraan Pameran 2. Keikutsertaan Pameran 3. Peningkatan SDM Kehumasan	1. 2 kegiatan 2. 10 Kegiatan 3. 20 orang

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tahun 2016 sesuai dengan Renja dan RKT tahun 2016 berjumlah Rp. 19.703.552.600,- namun ada Perubahan Anggaran menjadi Rp. 21.134.023.600,- Kenaikan Anggaran disebabkan adanya tambahan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah khusus untuk Pelaksanaan Akutansi dan Bendahara Barang ke Jakarta-Bandung sebesar Rp. 12.000.000,-, tambahan untuk kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat (Pertura) sebesar Rp. 50.000.000,-, dan tambahan untuk kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Media Informasi (Publikasi) sebesar Rp. 1.368.471.000,-. Jumlah anggaran tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dapat di lihat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2**ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016**

NO	PROGRAM	ANGGARAN DPA (Rp.)	ANGGARAN DPPA (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	813.739.000,-	1.030.539.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	993.500.000,-	1.023.500.000,-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	89.830.000,-	89.830.000,-
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.237.403.500,-	2.495.990.500,-
5	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	39.640.000,-	39.640.000,-
6	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	436.117.500,-	423.737.500,-
7	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	498.960.500,-	2.068.993.000,-

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah mengalami revisi, hal ini karena penyesuaian program kegiatan dan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga IKU yang terakhir dapat di lihat dalam tabel 2.3

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN
Terwujudnya Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	- Persentase SKPD yang memiliki PPID	$\frac{\text{Jumlah PPID}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$
	- Jumlah pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan dari berbagai media dan secara langsung
Terwujudnya Penyebaran Informasi	Tersedianya aksesibilitas informasi: a. Informasi melalui media massa	$\frac{\text{Jumlah media yang menginformasikan}}{\text{Jumlah Media}} \times 100\%$
	b. Informasi melalui media inter personal	Jumlah Penyelenggaraan dialog/seminar /diskusi/sarasehan
	c. Informasi melalui pertunjukan rakyat	Jumlah penyelenggaraan Penyampaian Informasi melalui kesenian rakyat/pertunjukan rakyat
	d. Informasi melalui media luar ruangan tercetak/terekam	Videotron, baliho, spanduk, film, surat kabar, majalah, booklet
	e. Pameran	Jumlah penyelenggaraan pameran dan keikutsertaan pameran

Terwujudnya aksesibilitas informasi melalui TIK		
	1. Persentase indeks kepuasan informasi website	$\frac{\text{Jumlah Puas}}{\text{Jumlah Pengunjung}} \times 100\%$
	2. Persentase SKPD yang menerapkan E.government	$\frac{\text{Jumlah SKPD Jaringan E.Gov}}{100\% \times \text{Jumlah SKPD}}$
	3. Persentase wilayah yang bisa mengakses internet	$\frac{\text{Jumlah Desa Terakses Internet}}{100\% \times \text{Jumlah Desa}}$
Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	1. Persentase KIM yang aktif	$\frac{\text{Jumlah KIM Aktif}}{\text{Jumlah KIM}} \times 100\%$

Indikator Program Kegiatan yang lebih lengkap dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang di dalamnya sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika , juga sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan serta program nasional Standard Pelayanan Minimal (SPM). Program/kegiatan dan Indikator serta target dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4**INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	12 bulan
1.2	Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah	Tersedianya jaminan asuransi barang milik daerah	1 paket
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor dan keuangan	20 orang/buln
1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja	31 unit
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	4 paket
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 paket
1.7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peraltan dan perlengkapan kantor	4 paket

1.8	Penyediaan makanan dan minumam	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	365 orang
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120 orang/kegiatan
1.10	Penyediaan jasa perkantoran	Tersedianya Koran dan majalah	12 bulan
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	180 orang
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	2 unit
2.2	Pengadaan mebelair	Tersedianya perlengkapan mebelair	15 unit
2.3	Pengadaan peralatan kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan kantor	32 unit

2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	2 paket
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan operasional	Mobil 4 buah Spd mtr 1 buah
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan
3	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pelaporan	
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	1 keg
3.2	Perencanaan dan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersediannya perencanaan kegiatan SKPD	2 keg
4	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	
4.1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi	5 SKPD

4.2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya system komunikasi dan informasi	50 orang
4.3	Pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi	Terbentuknya dan pembinaan telecenter	1 telencer 4 telecenter
4.4	Inventarisasi data informasi	Tersedianya pelayanan informasi masyarakat	72 pengaduan
4.5	Pemberdayaan dan monitoring pos dan telekomunikasi	Terlaksananya monitoring jasa pos dan tower telekomunikasi	12 bulan
5	PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Terlaksananya kegiatan pengkajian pengadaan Videotron	
5.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terlaksananya kegiatan pengkajian pengadaan Videotron	1 kegiatan
6	FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Meningkatkan SDM aparatur dan masyarakat bidang komunikasi dan informasi	
6.1	Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan KIM	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan KIM	Pembentukan 3 KIM Pembinaan 70 KIM

6.2	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	50 orang
7	KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Peningkatan kerjasama dalam penyebarluasan informasi	
7.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya kegiatan keikutsertaan dan penyelenggaraan pameran	Keikutsertaan 10 keg Penyelenggaraan 2 keg
7.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya sarana penyampaian informasi	12 bulan
7.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya penyampaian informasi multimedia	12 bulan
7.4	Penyediaan dan pengembangan media informasi	Tersedianya sarana informasi pada masyarakat	12 bulan
7.5	Sosialisasi ketentuan bidang cukai	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai	12 bulan
7.6	Sosialisasi ketentuan bidang cukai melalui Multi media	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan sosialisasi ketentuan bidang cukai melalui mediaelektronik	3 Buah

BAB III
Akuntabilitas kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 berdasarkan LKPJ dapat dilihat dalam tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama ini juga sebagai Pengukuran Pencapaian Sasaran, sehingga capaian ini merupakan capaian dari Sasaran Renstra (Rencana Strtegis) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan IKU capaian Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat tercapai 100 persen, terdapat juga yang kurang tercapai dan terdapat pula yang melebihi target capaian. Namun demikian kalau dihitung rata-rata persentase capaian IKU adalah sebesar 91,63 persen. Dengan demikian capaian Indikator Kinerja Utama melebihi target.

Tabel 3.1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
(IKU)
TAHUN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	1.Persentase SKPD yang memiliki PPID	50 %	50%
		2.Jumlah pengaduan masyarakat	72 pengaduan	50%
2.	Terwujudnya Penyebaran Informasi	Tersedianya aksetabilitas informasi:		
		a. Informasi melalui media massa	40%	100%

		b. Informasi melalui media inter personal	12 kegiatan	100%
		c. Informasi melalui pertunjukan rakyat	12 kegiatan	216%
		d. Informasi melalui media luar ruangan tercetak/terekam	115 buah	120%
		e. Pameran :	12 kegiatan	117%
3	Terwujudnya aksesibilitas informasi melalui TIK	1. Persentase indeks kepuasan informasi website	25%	50%
		2. Persentase SKPD yang menerapkan E.government	30%	50%
		3. Persentase wilayah yang bisa mengakses internet	95%	95%
4	Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	1. Persentase KIM yang aktif	65%	60%

Selain capaian berdasarkan LKPJ/Pengukuran Pencapaian Sasaran juga disajikan Pengukuran Kinerja Kegiatan yang merupakan capaian dari keseluruhan kegiatan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti halnya capaian LKPJ, Pengukuran Kinerja Kegiatan terdapat capaian yang mencapai target 100 persen, terdapat pula yang tidak memenuhi target dan terdapat juga yang melebihi target. Dan ada pula yang tidak bisa terlaksana samasekali atau Nol persen. Dengan demikian rata-rata capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan sebesar 101,81 persen. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran		
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi,air dan listrik	12 bulan	12 bulan
1.2	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jaminan asuransi barang milik daerah	1 paket	1 paket
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor dan keuangan	20 orang/bulan	20 orang/bulan

1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kantor	31 unit	31 unit
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	4 paket	4 paket
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 paket	4 paket
1.7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	4 paket
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	365 orang	364 orang
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120 org/keg	120 org/keg
1.10	Penyediaan jasa perkantoran	Tersedianya Koran dan majalah	12 bulan	12 bulan
1.11	Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	180 orang	180 orang

2	Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	2 unit	2 unit
2.2	Pengadaan mebelair	Tersedianya perlengkapan mebelair	15 unit	14 unit
2.3	Pengadaan peralatan kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan	32 unit	22 unit
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	2 paket	2 paket
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan operasional	Mobil 4 buah Spd mtr 1 buah	Mobil 4 buah Spd mtr 1 buah
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan
3	Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pelaporan		
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kiinerja	1 keg	1 keg

3.2	Perencanaan dan pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Tersedianya perencanaan kegiatan SKPD	2 keg	2 keg
4	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		
4.1	Pembinaan dan	Terlaksananya	5 SKPD	5 SKPD
4.2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya system komunikasi dan informasi	50 orang	0
4.3	Pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi	Terbentuknya dan pembinaan telecenter	1 telecenter 4 telecenter	0 telecenter 4 telecenter
4.4	Inventarisasi data informasi	Tersedianya pelayanan informasi masyarakat	72 pengaduan	36 pengaduan
4.5	Pemberdayaan dan monitoring pos dan telekomunikasi	Terlaksananya monitoring jasa pos dan tower telekomunikasi	12 bulan	12 bulan
5	Pengkajian Penelitian dan Bidang dan Komunikasi Informasi	Terlaksananya kegiatan pengkajian pengadaan Videotron		
5.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terlaksananya kegiatan pengkajian pengadaan Videotron	1 kegiatan	0

6	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya SDM aparatur dan masyarakat bidang komunikasi dan informasi		
6.1	Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan KIM	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan KIM	Pembentukan 3 KIM Pembinaan 70 KIM	Pembentukan 4 KIM Pembinaan 65 KIM
6.2	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	50 orang	0
7	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Peningkatan kerjasama dalam penyebarluasan informasi		
7.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya kegiatan keikutsertaan dan penyelenggaraan pameran	Keikutsertaan 10 keg Penyelenggaraan 2 keg	Keikutsertaan 11 keg Penyelenggaraan 3 keg
7.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya sarana penyampaian informasi	12 bulan	12 bulan
7.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya penyampaian informasi multimedia	12 bulan	12 bulan

7.4	Penyediaan dan pengembangan informasi media	Tersedianya sarana informasi pada masyarakat	12 bulan	12 bulan
7.5	Sosialisasi ketentuan bidang cukai	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai	12 kali	12 kali
7.6	Sosialisasi ketentuan bidang cukai melalui multi media	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan sosialisasi ketentuan bidang cukai melalui elektronik	3 buah	3 buah

Selain capaian berdasarkan LKPJ / Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan juga disampaikan Realisasi dan target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dengan rata-rata capaian sebesar 160,43 persen. Dapat di lihat Tabel 3.2.

Tabel 3.3

Realisasi dan Target Renstra

NO	INDIKATOR	REALISASI	TARGET RENSTRA
1	Persentase peningkatan sistem komunikasi antar SKPD	65 SKPD	65 SKPD
2	Persentase peningkatan sistem komunikasi	0 sistem	1 sistem
3	Persentase peningkatan Telecenter	0 unit	1 unit

4	Peningkatan pelayanan informasi pengaduan yang disampaikan ke SKPD	36 pengaduan	72 pengaduan
5	Tersedianya data tower telekomunikasi	0	0
6	Tersedianya Master plan Video Trons	0 kegiatan	1 kegiatan
7	Persentase peningkatan pembentukan KIM Pembinaan KIM	4 Kelompok 65 kelompok	3 kelompok 70 kelompok
8	Persentase peningkatan pameran Penyelenggaraan Keikutsertaan	3 kali 11 kali	2 kali 10 kali
9	Persentase peningkatan sarana penyampaian informasi : Hari jadi Provinsi hari jadi kabupaten	1 kali 1 kali	- -
10	Persentase peningkatan penyebaran informasi, komunikasi : Dialog interaktif Dialog publik Kesenian tradisional Leaflet	12 kegiatan 12 kegiatan 26 kegiatan 7000 eksemplar	12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 7000 eksemplar
11	Persentase peningkatan penyediaan informasi Tabloid/majalah Spanduk/baliho	26000 eksemplar 48 tema	12 000 eksemplar 48 tema

Realisasi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan kebijakan Program nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang harus di capai oleh daerah-daerah seluruh Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan juga berdasarkan SPM, dengan beberapa kegiatan yang capaian telah melebihi target Nasional, sebagai contoh adalah pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), target nasional adalah 50 persen dari jumlah kecamatan, Kabupaten Pasuruan yang kecamatannya berjumlah 24 kecamatan jadi target nasional sebesar 12 KIM, tapi sampai akhir 2016 Telah mencapai 132 KIM. Jadi Kabupaten Pasuruan telah mencapai melebihi target yang sangat signifikan. Termasuk kegiatan penyampaian informasi melalui Pertunjukan Rakyat, target nasional 12 kali per tahun, Kabupaten Pasuruan telah mencapai melebihi target sebanyak 26 kali. Dapat dilihat dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
SPM

NO	INDIKATOR	REALISASI	Capaian
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:		
	a. Media massa:	136	100 %
	b. Media website (media online)	Ada Setiap hari	Ada setiap hari
	c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;	26 kali	216%
	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	12 kali	100%
	e. Media luar ruang:	12 kali	100%
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	132 kelompok	105%

Dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2016 secara umum terdapat berapa kegiatan yang telah mencapai 100%, ada yang melebihi dari target sehingga lebih dari seratus persen, akan tetapi ada juga kegiatan yang tidak mencapai target. Namun dari data Pengukuran Pencapaian Sasaran/LKPJ (Tabel 3.1), Pengukuran Kinerja Kegiatan (Tabel 3.2) , Realisasi dan Target Renstra (Tabel 3.3) dan SPM (Tabel 3.4) semua rata-rata telah mencapai melebihi target (Di atas 100 Persen), namun demikian ada yang perlu menjadi perhatian.

Analisa 1.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ditunjang antara lain perencanaan yang matang, didukung dengan SDM yang memadai serta didukung oleh stockholder yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kurang berhasilnya dalam mencapai target terkendala perencanaan yang kurang matang karena kurang data yang valid serta kurangnya koordinasi baik dalam Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun dengan SKPD yang lain Kenaikan dan Penurunan hampir sama dengan hal tersebut diatas.

Analisa 2.

Dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan diupayakan untuk melaksanakan efisiensi dan efektifitas, hal itu dapat tercapainya beberapa kegiatan dengan memaksimalkan SDM yang ada serta kerja sama dengan stockholder serta masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target dan ada satu kegiatan yang capaiannya tidak ada sama sekali.

Kegiatan tidak tercapai sama sekali itu adalah kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai melalui Multimedia dengan kegiatan pengadaan 10 Unit Videotron yang akan di tempatkan di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan. Namun Karena berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu penempatan Videotron harus melalui prosedur, yaitu Study Kelayakan serta Proses pelelangan umum. Karena Kegiatan tersebut hasil APBD-P, maka keterbatasan waktu memungkinkan untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut, baru hanya pada kegiatan lain sebagai pendukung adalah Kegiatan studi kelayakan yang baru bisa terlaksana, untuk kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai melalui Multimedia tidak bisa terlaksana.

Solusi

Perlu adanya perencanaan yang matang dengan didukung validitas data dan uptodate sehingga dengan perencanaan yang mantap akan mendukung keberhasilan untuk mencapai target. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, baik swasta maupun SKPD serta stockholder.

Sosialisasi sangat perlu untuk dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan sehingga kegagalan/ketidak berhasilan dapat dihindari.

B. Realisasi Anggaran

Terlaksananya program dan kegiatan Dinas Komunikasi pada tahun anggaran 2016 untuk target kegiatan terealisasi mencapai rata-rata di atas 100 persen, namun serapan anggaran sangat kecil, hanya 28,97 persen.

Rendahnya serapan anggaran namun tingginya capaian target kinerja, hal ini karena satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang cukai melalui Videotron, yang anggarannya Rp 20.000.000.000,-. Lihat Tabel 3.5.

Dengan tidak terlaksananya satu kegiatan sangat mempengaruhi yang sangat signifikan mengakibatkan daya serap yang sangat rendah dalam penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2016.

Tabel 3.5

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	1.030.539.000	989.230.536	95,99

1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	187.600.000	164.051.852	87,44
1.2	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jaminan asuransi barang milik daerah	6.000.000	5.694.900	94,92
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor dan keuangan	111.740.000	104.765.000	93,76
1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja	21.000.000	21.000.000	100
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	88.650.000	88.306.500	99,77
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	24.037.800	23.829.100	99,13
1.7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	13.784.000	13.736.000	99,65

1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	50.000.000	49.803.500	99,61
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	288.077.200	288,033,684	99,98
1.10	Penyediaan jasa perkantoran	Tersedianya Koran dan majalah	225.450.000	215.700.000	95,68
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	14.200.000	14.170.000	99,79
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1.023.500.000	8 82.505.000	86,22
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	45.140.000	44.240.000	98,01
2.2	Pengadaan mebelair	Tersedianya perlengkapan mebelair	40.280.000	39.500.000	98,06

2.3	Pengadaan peralatan kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan kantor	364.300.000	226.000.000	62,04
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	125.280.000	124.528.000	99,40
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan operasionalnya	368.500.000	368.237.000	99,93
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	80.000.000	80.000.000	100
3	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pelaporan	89.830.000	75.740.000	84,31
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	73.580.000	60.240.000	81,87
3.2	Perencanaan dan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersedianya perencanaan kegiatan SKPD	16.250.000	15.500.000	95,38
4	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	2.495.990.500	2.060.541.876	82,55

4.1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi	1.615.793.500	1.523.819.000	94,31
4.2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya system komunikasi dan informasi	55.790.000	0	0
4.3	Pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi	Terbentuknya dan pembinaan telecenter	374.815.000	231.819.626	61,85
4.4	Inventarisasi data informasi	Tersedianya pelayanan informasi masyarakat	19.863.000	9.915.000	49,92
4.5	Pemberdayaan dan monitoring pos dan telekomunikasi	Terlaksananya monitoring jasa pos dan toer telekomunikasi	429.729.000	294.988.250	68,65
5	PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Terlaksananya kegiatan pengkajian pengadaan Videotron	39.640.000	0	0
5.1	Pengkajian penelitian informasi komunikasi dan bidang dan	Terlaksananya kegiatan pengkajian pengadaan Videotron	39.640.000	0	0

6	FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Meningkatnya SDM aparatur dan masyarakat bidang komunikasi dan informasi	423.737.500	192.335.200	45,39
6.1	Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan KIM	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan KIM	384.097.500	192.335.200	50,07
6.2	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	39.640.000	0	0
7	KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Peningkatan kerjasama dalam penyebarluasan informasi	14.235.344.800	13.659.192.234	95,95
7.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya kegiatan keikutsertaan dan penyelenggaraan pameran	1.403.993.000	1.402.140.000	99,87
7.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya sarana dan penyampaian informasi	1.064.150.000	912.971.400	85,79

7.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya penyampaian informasi multimedia	865.203.500	660.155.750	76,30
7.4	Penyediaan dan pengembangan media informasi	Tersedianya sarana informasi pada masyarakat	2.776.498.300	2.767.136.000	99,66
7.5	Sosialisasi ketentuan bidang cukai	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai	1.305.650.000	1.112.451.800	85,20
7.6	Sosialisasi ketentuan bidang cukai melalui muti media	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan sosialisasi ketentuan bidang cukai melalui media elektronik	6.819.850.000	6.804.337.284	99,77

BAB IV

PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan program kegiatan ada beberapa kegiatan yang mencapai target dan ada yang melebihi target serta yang menjadi perhatian adalah yang kurang mencapai target. Di dalam melaksanakan kegiatan selain memanfaatkan SDM yang ada juga kerja sama dengan pihak-pihak terkait baik itu Stakeholder, instansi swasta, Instansi pemerintah vertikal dan SKPD serta masyarakat luas dalam usaha untuk mencapai sasaran strategis.

Khusus untuk kegiatan yang tidak terlaksana akan di rencanakan untuk kegiatan tahun 2016 dengan penyesuaian berdasarkan hasil pengkajian survey kelayakan. Namun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Laporan Sakip tahun 2016 disampaikan sebagai bahan evaluasi, pertanggung jawaban kinerja SKPD kepada Bupati Pasuruan.

Pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2016 ini terdapat suatu masukan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun mendatang. Masukan itu berupa penyempurnaan dalam Indikator Kegiatan Utama, sehingga dalam tahun 2016 akan lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian laporan Sakip ini disusun sebagai laporan sekaligus sebagai salah satu acuan dalam menyusun program kegiatan dalam tahun mendatang

Pasuruan, 16 Pebruari 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan,

TTD

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, MSi.

Pembina Utama Muda

Nip. 19691010 198903 1 013